

Kecenderungan Pemberitaan tentang *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas*

Josep J. Darmawan & Birgitta Bestari Puspita Jati

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta 55281
Email: josepdarmawan@gmail.com

Abstract: *It is President's right to reshuffle the cabinet in order to maximise the government's performance. However, the society views this process as politic matter, which they learn from the media. This research observes the news tendency about the reshuffle of Kabinet Indonesia Bersatu II in Kompas and Jawa Pos daily newspaper. Content analysis is used to the news accounts during September-October 2011 with Westerstahl's objectivity as conceptual preference. The result shows that both newspapers, technically, have given good coverage about the issue yet still less objective. Psychology fact, interview, not neutral, partiality, non primary knowledge is the factors that trigger it.*

Key Words: *newspaper, news, news tendency, objectivity.*

Abstrak: *Perombakan kabinet merupakan hak presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet. Namun proses pembelajaran di masyarakat mengarahkan perombakan kabinet sebagai persoalan politik. Media massa merupakan agen sentral dalam pembelajaran tersebut. Penelitian ini melihat bagaimana kecenderungan pemberitaan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di harian Kompas dan Jawa Pos. Metode analisis isi digunakan terhadap berita-berita dalam periode September-Oktober 2011 dengan obyektivitas Westersthal sebagai preferensi konseptualnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berita di kedua harian secara teknis sudah baik, tetapi pemberitaan terkesan kurang obyektif. Fakta psikologis, wawancara, tak netral, tak multi sisi, pengetahuan non-primer adalah faktor yang memicu kecenderungan tersebut.*

Kata Kunci: *suratkabar, berita, kecenderungan pemberitaan, obyektivitas*

Perombakan (*reshuffle*) kabinet di Indonesia merupakan fenomena yang menarik. Secara normatif perombakan kabinet diwacanakan sebagai solusi presiden dalam rangka mengatasi stagnasi yang menghambat pencapaian kerja kabinet. Namun sebagai pengalaman baru yang ditemukan di era pasca peristiwa reformasi, *common sense* publik cenderung mengatakan bahwa hal itu senantiasa terkait dengan kepentingan-

kepentingan politik yang melatari dan memicunya.

Pada dasarnya fenomena perombakan padaposisi-posisi *top management* semacam yang terjadi dalam kabinet pemerintahan itu adalah hal wajar. Posisi *top manager* dalam suatu organisasi adalah posisi strategis dan vital yang tanggung jawab utamanya adalah mengawal operasionalisasi kebi-

jakan demi tercapainya tujuan-tujuan besar. Dalam konteks pemerintahan tujuan-tujuan besar tersebut utamanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Maka ketika seorang *top manager* dinilai tidak lagi memiliki kepekaan dan kecepatan, ataupun kapasitas yang diharapkan, dalam mewujudkan keberhasilan dan mengatasi permasalahan dalam pekerjaannya, ia dianggap pantas untuk diganti tanpa menunggu masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan pada perspektif tersebut, keputusan presiden untuk merombak komposisi kabinetnya di tengah-tengah masa kerja dapat dipahami. Sebagai kepala pemerintahan, kewenangan presiden (didasarkan pada Pasal 17 ayat 2 UUD 45) pada hal semacam itu idealnya adalah untuk mengusahakan tercapainya target-target dalam program kerja pemerintah, baik di tingkat makro, mezzo maupun mikro. Hal itu bukan hanya sebagai wujud dari pertanggungjawaban presiden dan pemerintahannya dalam merealisasikan prestasi kerja dalam rangka meningkatkan serta memajukan negara dan rakyatnya, namun juga sebagai bentuk pertarungan kredibilitas presiden dan *trust* rakyat kepadanya atas pencitraan yang pernah dijanjikan pada masa kampanye.

Kabinet dan politik adalah dua sisi mata uang yang terikat. Sejak suatu kabinet pemerintahan diedukasikan sebagai produk yang lahir dari citra politik demokratis pasca peristiwa reformasi, setiap dinamika dan gejolak yang mengarah pada pembenahan kabinet kemudian cenderung dilihat juga melalui bingkai yang kurang lebih sama.

Sejak itu proses pembelajaran politik bagi masyarakat Indonesia berjalan cukup intens. Nyaris hampir setiap hari banyak ditransaksikan informasi yang memuat pewacanaan perpolitikan di Indonesia, melalui berbagai macam kasus, kejadian, produk kebijakan, pernyataan-pernyataan baik secara institusional, individual maupun kelompok. Melalui berita-berita yang beredar di media massa, masyarakat dimudahkan untuk “memantau” dan “memahami” dinamika politik yang panggung utamanya diramaikan oleh saling-lontar pernyataan dari berbagai pihak, termasuk dalam soal perombakan kabinet tersebut. Dari berita-berita itu pula publik “dibantu” untuk melihat bagaimana konflik dan ketegangan-ketegangan politik tampak seperti selalu membayang dalam guliran wacana tentang perombakan kabinet tersebut.

Perihal ini, Arno (Darmawan, 2007:259) telah lama mengatakan bahwa konflik adalah satu-satunya alasan dan sumber inspirasi dibuatnya suatu berita. Karena ada konflik maka berita dapat dihasilkan. Lantaran soal konflik itu pula saluran-saluran media yang terinstitusi secara khusus kemudian dikaitkan dengan konflik-konflik tersebut. Siapapun dan darimanapun sumber informasi yang digunakan oleh media lantas akan dianggap terkait dengan masalah yang sedang diberitakan. Menjadi tak terhindarkan munculnya kesan seolah-olah semua orang atau lembaga yang turut bicara tentang *reshuffle* adalah mereka yang terkait dengan persoalan *reshuffle* itu sendiri.

Meski bermuatan konflik dan hanya dibuat semata-mata demi konflik, tetapi berita, menurut Golding & Elliot (Darmawan, 2007:261), telah menjadi sumber keyakinan dan nilai-nilai penting bagi khalayak. Lebih jauh dikatakannya bahwa berita (terlanjur) dimanfaatkan untuk mengenali dan mengetahui kehidupan masyarakat sendiri dan lingkungan tempat hidup mereka. Tentang apapun dan bagaimanapun berita itu dibuat seperti tak terlalu menjadi soal karena produksinya diyakini melewati suatu mekanisme yang akan membuat berita tersebut dapat dianggap layak untuk dimuat di media dan cenderung akan diterima oleh publik sebagaimana adanya. Ini menimbulkan kesan bahwa media adalah agen yang punya efek kuat bagi khalayak. Barangkali sistem kerja media leluasa memungkinkannya begitu, tetapi perlu diingat bahwa menganggap publik membiarkan dirinya secara pasrah untuk diarahkan oleh berita-berita di media barangkali merupakan gagasan yang merendahkan publik yang aktif.

Media massa yang merupakan pelaku sentral proses pembelajaran dan sekaligus terbentuknya wacana perombakan kabinet tersebut hanya mungkin beroperasi dalam atmosfir yang kondusif. Di Indonesia ada dua pemicu yang signifikan memungkinkan terciptanya atmosfir tersebut. *Pertama*, reformasi yang telah menjadi pintu gerbang terwujudnya kebebasan pers dalam rangka membangun tatanan politik baru di Indonesia, di mana fungsi dan peran pers secara luar biasa, kemudian mengalami pembaruan dalam tugas penyebarluasan

berita dan informasi kepada publik. *Kedua*, industrialisasi media massa, yang membuka keleluasaan cara kerja media dalam mempraktekkan kebebasan pers. Terciptanya atmosfir tersebut memungkinkan media untuk melakukan eksposisi varian sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan berita dan atau basis wacana kepada publik. Terkait isu *reshuffle*, “keramaian” komentar, opini, pernyataan dari berbagai sumber melalui berbagai macam peristiwa dan acara, jamak menjadi pola dalam penghasilan berita. Pola semacam itu sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu siasat klasik media massa yang memiliki cara kerja dengan mencari penguat-penguat untuk membangun legitimasi *issue* bagi publik.

Proses pembelajaran yang terbentuk karenanya sangat memungkinkan munculnya perspektif di masyarakat bahwa perombakan kabinet adalah pentas politik dalam bentuk yang lain. Alasan perombakan, menteri yang akan diganti, sosok calon pengganti, pernyataan-pernyataan setiap pihak berkenaan dengan itu semua, kemudian mudah disinyalir mempunyai pertautan yang kuat dengan kasak-kusuk politik yang melatari panggung perombakan kabinet tersebut. Dalam konteks perombakan kabinet di era kedua pemerintahan presiden SBY sinyalemen pertautan tersebut sangat kuat. Hal ini terjadi karena telah berkembang semacam wacana tentang bagaimana presiden SBY begitu bergantung dengan “koalisi gemuk” partai-partai koalisi pendukung pemerintahannya, di mana kesepakatan-

keepakatan politik dalam partai koalisi tersebut justru ditengarai sebagai sumber masalah bagi pemerintahannya.

Hal ini kemudian dapat membentuk pengertian bahwa apa yang disampaikan di media massa adalah semacam representasi dan aspirasi yang datang dari masyarakat. Berbagai pernyataan para sumber berita tersebut seolah-olah merupakan gambaran dari aspirasi masyarakat secara luas. Para sumber seolah-olah telah mengambil peran sebagai wakil masyarakat ketika melontarkan pernyataan-pernyataannya. Perspektif yang berpotensi distortif ini bukanlah hal baru dalam dunia media massa. Kita, misalnya, bisa mengenalnya melalui teori *agenda setting*. Diperkuat dengan konsep-konsep yang mengakui fungsi dan peran media massa sebagai *watch dog* ataupun pilar keempat penegak demokrasi, substansi pesan atau informasi yang disampaikan di media pada akhirnya lebih merupakan gagasan, ide atau pemikiran dari media massa itu sendiri. Masyarakat, yang menjadi kemasam dari artikulasi media tersebut, tak lebih hanya sebagai suatu bentuk “pemarjinalan diri” di hadapan kekuatan negara atau pemerintah.

Menala sikap atau opini media massa lantas dapat menjadi bahan penting untuk pemetaan aspirasi “masyarakat” dalam persoalan semacam perombakan kabinet ini. Sebagai institusi yang bersifat subsistem, media massa jelas memiliki kekuatan untuk menstimulasi “ayunan pendulum” sikap, perhatian dan penerimaan masyarakat atas kinerja pemerintahan bagi rakyatnya. Dengan berbagai pemberitaan yang menjadi

pembelajaran politik bagi masyarakat, kemudian kita bisa melihat apakah orientasi media, misalnya, peduli akan implikasi penting keputusan perombakan kabinet tersebut bagi kepentingan masyarakat luas, ataukah hanya menjadikannya semacam momentum untuk mendorong konsumsi sesaat saja (senada dengan bahwa hal itu tak lebih dari sekedar jualan isu). Oleh karena itu, menjajagi bagaimana kecenderungan pemberitaan tentang *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II di harian *Kompas* dan *Jawa Pos* dapat merupakan langkah awal untuk mencermati hal tersebut.

Obyektivitas bisa jadi hanya merupakan salah satu dari syarat-syarat sebuah berita, namun obyektivitas pun memiliki peranan penting sebagai kunci bagi khalayak untuk menilai apakah berita tersebut dapat dipercaya dan reliabel (McQuails, 1992:183). Sudah menjadi tanggung jawab media, sebagai pembawa pesan, untuk menyajikan informasi yang obyektif bagi khalayaknya. Meskipun begitu Gaye Tuchman (dalam Manning, 2001:68) melalui artikelnya “*Objectivity as a Strategic Ritual*” meragukan bahwa obyektivitas dapat diterapkan oleh seorang jurnalis dalam upayanya untuk menghasilkan liputan yang bebas nilai dan komprehensif berdasarkan “peristiwa nyata”. Tuchman meyakini bahwa obyektivitas merupakan suatu kerangka praktek yang dianggap oleh jurnalis sebagai “obyektif”. Artinya, obyektivitas adalah suatu siasat supaya berita yang dihasilkan jurnalis dapat diklaim obyektif.

Penelitian ini menggunakan kerangka obyektivitas yang dikemukakan oleh Westersthall, yang membedakan dimensi kognitif (*factuality*), yang terdiri atas kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*), dan dimensi evaluatif (*impartiality*), yang terdiri dari netralitas (*neutrality*) dan keseimbangan (*balance*). Perbedaan ini akan membantu memisahkan antara nilai dan fakta, sehingga obyektivitas pemberitaan dapat diketahui sebagaimana terlihat pada skema 1 berikut ini.



Dimensi pertama adalah dimensi kognitif (*factuality*). *Factuality* (faktualitas) terbagi atas dua sub dimensi, yaitu *truth* (kebenaran) dan *relevance* (relevansi). *Truth* merujuk pada reliabilitas dan kredibilitas sebuah fakta. *Truth* dapat diukur melalui *factualness*, yaitu pemisahan antara opini dengan fakta; *accuracy* yaitu kecermatan data (seperti angka, nama, tempat, waktu, jabatan, dan lain-lain); dan *completeness* yang menyangkut jumlah informasi relevan yang dibutuhkan untuk memahami suatu fakta. (McQuail, 1992:197).

Pada umumnya formula dasar yang selalu digunakan wartawan di dalam pembuatan berita ialah 5W+1H (*Who,*

What, Where, When, Why dan *How*) dan cara penyampaian yang menggunakan formula piramid terbalik, yaitu berawal dari yang penting hingga kurang penting (Wahyudi, 1996:30), tetapi ini tidak memadai untuk mengatakan bahwa suatu berita memiliki nilai. Darmawan (2007:270), mengutip dari Murdock serta Golding dan Elliot, mengungkapkan adanya penolakan anggapan bahwa berita adalah suatu reaksi yang acak atas peristiwa yang tak teratur. Ini bermaksud seolah-olah berita dihasilkan dari suatu respon tak bermotif atas sembarang peristiwa yang terpilih secara tak sengaja. Seolah-olah tak ada alasan-alasan yang mendahului pemilihan itu, entah alasan teknis, praktis maupun taktis. Dikatakan pula bahwa berita itu merupakan wujud dari bias wartawan, yang disebabkan oleh aturan profesional berkenaan dengan mekanisme pembuatan struktur berita maupun berdasarkan suatu pandangan sosial tentang ide yang harus disampaikan melalui pemberitaan.

Relevance (relevansi) merupakan kunci untuk menentukan kualitas dari pemilihan berita (*gatekeeping*). Hal yang membuatnya menjadi sulit adalah saat menentukan penting tidaknya sebuah berita, karena pertanyaan yang akan muncul adalah penting menurut siapa. Menurut McQuail (1992:199), *relevance* dapat ditentukan dengan melihat *normative standards of relevance, real world, audience, dan journalistic*. Relevansi berhubungan dengan nilai berita yang sarat dengan informasi. Menurut McQuail ada perbedaan penting antara menarik dan informatif:

The more that news has such features, the more it may be thought to be lacking in 'information value', and thus unlikely to be relevant to information needs, however immediately interesting it may be to audiences. (McQuails, 1992:200)

Nilai berita merupakan merupakan faktor penting dalam konteks *relevance* ini karena nilai berita dapat dipakai sebagai pendekatan menilai kualitas berita dan pemberitaan itu sendiri. Menurut Golding dan Elliot (Darmawan, 2007:273) nilai berita digunakan dengan dua cara. *Pertama*, sebagai kriteria jurnalis memilih bahan-bahan berita yang telah ada. *Kedua*, sebagai panduan dalam penyampaian berita, seperti tentang masalah yang perlu diberi penekanan, dikurangi ataupun diutamakan. Dengan demikian nilai berita juga merupakan satu aturan praktis yang diwujudkan di dalam pekerjaan membuat berita. Selanjutnya, Golding dan Elliott mengemukakan sebelas aspek untuk melihat nilai berita (di dalam berita televisi), yaitu (1) drama, (2) daya tarik visual, (3) hiburan, (4) kepentingan, (5) ukuran, (6) kedekatan, (7) keringkasan, (8) negativitas, (9) kebaruan, (10) elit dan (11) keperibadian. McQuail (1994:271) juga mengungkapkan tujuh aspek nilai berita yang lain, yaitu (1) skala kejadian (*scale of events*), (2) ketertutupan (*closeness*), (3) kejelasan, (4) kaitan, (5) keselarasan, (6) personifikasi dan (7) skala waktu pendek (*short time scale*). Secara umum, relevansi dengan demikian berkenaan dengan nilai-nilai berita, berbagai pernyataan dari narasumber yang dibebankan di dalam berita dan keterkaitan antara isi berita dengan pokok hal yang sedang menjadi fokus perhatian.

Dimensi yang kedua adalah dimensi evaluatif (*impartiality*). *Impartiality* (imparsialitas) hendak melihat apakah seorang reporter berpihak dalam menulis sebuah fakta, yang biasanya menyangkut beberapa kepentingan. Karena dalam sebuah reportase yang baik, seorang wartawan harus dapat melihat fakta secara utuh dan tidak melihat dari satu sudut pandang saja. *Impartiality* terdiri atas dua sub dimensi, yaitu *balance* dan *neutral presentation (neutrality)*.

Balance (keseimbangan) merujuk pada seleksi atau penghilangan fakta yang dapat berat sebelah, sebab *balance* menuntut adanya perhatian yang sama terhadap semua aktor dalam suatu peristiwa. Terdapat dua hal yang dapat menentukan keseimbangan sebuah berita, yaitu adanya *equal or proportional access* (pemberian akses yang sama dan proporsional untuk semua aktor yang terlibat) dan *even-handed evaluation* (penilaian yang berimbang kepada masing-masing aktor yang terlibat).

Neutral presentation (presentasi netral) berarti bahwa sebuah berita harus netral, dan tidak berpihak pada salah satu aktor, sebab berita bukan merupakan opini yang mengizinkan reporter untuk berpihak. *Neutral presentation* berkaitan dengan penyajian yang non-evaluatif dan non-sensasional (McQuail, 1992:200-203). Berkenaan dengan ini Cohen (dalam McQuail, 1992:145-146) mengemukakan dua peran reporter. Pertama, konsep "reporter netral" di mana pers sebagai pemberi berita, penafsir, dan alat pemerintah (pers sebagai saluran atau cermin). Kedua, peran "pemeran-serta",

yang dikenal dengan “*the traditional Fourth Estate*” di mana pers sebagai wakil publik, pengkritik pemerintah, pendukung kebijakan, dan pembuat kebijakan. Peran netral merupakan peran yang searah dengan obyektivitas sebagai nilai utama dan unsur penting profesionalisme baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis isi digunakan dalam penelitian ini karena salah satu tujuannya adalah menggambarkan karakteristik pesan-pesan dalam ranah publik melalui perantara teks (Frey et al., 1991:212). Analisis isi, menurut Krippendorff (1993:15), merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Berelson (dalam Krippendorff, 1993:16) menyatakan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (*manifest*). Sedangkan Kerlinger (dalam Wimmer & Dominick, 2003:141) mendefinisikan analisis isi melalui tiga konsep yang memerlukan elaborasi, yaitu: 1). Sistematis, di mana peneliti harus menggunakan prosedur dan aturan yang sama untuk menganalisis semua data dalam penelitian; 2) Obyektif, menekankan pada hasil yang sama apabila penelitian tersebut dilakukan kembali oleh peneliti yang lain. Kerlinger lebih menekankan pada penentuan unit analisis dan definisi operasional penelitian dan 3). Kuantitatif, penghitungan penting dalam analisis isi karena akan membantu peneliti untuk mencapai keakuratan hasil penelitian,

sesuai dengan tujuan dari analisis isi yaitu representasi yang akurat dari isi sebuah teks.

Analisis isi menurut John Fiske (1990:136) didesain untuk menghasilkan sebuah perhitungan terhadap isi pesan yang tampak (*manifest*) secara obyektif, terukur dan dapat diverifikasi. Untuk itu, analisis isi akan mencapai hasil yang lebih akurat apabila digunakan untuk mengukur data dengan skala besar, dengan unit analisis apa saja yang diinginkan oleh peneliti selama unit analisis tersebut teridentifikasi dan muncul secara berkala. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga validitas perhitungan statistik yang nantinya dilakukan oleh peneliti. Beberapa kelebihan analisis isi seperti yang disampaikan Krippendorff (1993:34) yaitu: (1) analisis isi merupakan metode yang tidak mencolok (*unobtrusive*), (2) analisis isi menerima bahan yang tidak terstruktur, (3) analisis isi peka terhadap konteks, sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik, (4) analisis isi dapat mengatasi data dalam jumlah besar.

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Populasi dalam penelitian ini adalah berita-berita yang berkaitan dengan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH *Kompas* dan SKH *Jawa Pos* periode September-Oktober 2011. Dari populasi tersebut ditarik sampel dengan teknik *purposive sampling*, di mana anggota sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah, baik dari buku-buku, surat kabar, maupun tulisan-tulisan pada situs internet.

Tahap selanjutnya dalam metode analisis isi adalah menganalisis data yang sebelumnya telah dikategorikan dan dimasukkan dalam lembar koding. Melalui lembar koding tersebut penghitungan data dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi. Agar tercapai hasil

yang obyektif dan reliabel, uji reliabilitas akan diterapkan. Secara sederhana prinsip dari uji reliabilitas adalah semakin tinggi persamaan hasil pengkodean di antara kedua pengkode, maka semakin *reliable* kategori yang telah disusun. Derajat kesamaan dinilai memenuhi syarat kepercayaan apabila hasilnya menunjukkan 0,6 (60%). Untuk analisis penelitian ini digunakan unit analisis dan kategorisasi seperti dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Unit Analisis dan Kategori

No.	Unit Analisis	Kategori
1.	Media	Suratkabar
2.	Nama Harian	<i>Kompas</i> dan <i>Jawa Pos</i>
3.	Waktu	September – Oktober 2011
4.	Genre	Berita
5.	Truth	
	a. Jenis Fakta	1. Fakta Psikologis 2. Fakta Sosiologis
	b. Kelengkapan unsur-unsur berita (5W+1H)	1. Baik 2. Sederhana 3. Buruk 4. Tidak ada
6.	Relevance	
	a. Nilai Berita	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah
	b. Pernyataan Narasumber	1. Relevan 2. Tidak relevan
	c. Kaitan	1. Langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara khusus 2. Tak langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara khusus 3. Langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara umum 4. Tak langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara umum
7.	Balance	
	Tipe Liputan	1. Multi sisi 2. Dua sisi 3. Satu sisi
8.	Neutral presentation	
	Arah/penyampaian berita	1. Neutral 2. Positif 3. Negatif
9.	Konteks	1. Wawancara 2. Pertemuan Resmi 3. Kejadian Aktual
10.	Pengetahuan Dalam Berita	1. Primer 2. Sekunder 3. Evaluatif 4. Rekomendasi

Operasionalisasi dari unit-unit analisis tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Jenis fakta dalam berita, melihat apakah berita tersebut disusun berdasarkan fakta atau interpretasi terhadap sebuah peristiwa.
 1. Fakta sosiologis, apabila berita tersebut disusun dengan bahan baku yang berupa peristiwa/kejadian nyata/faktual.
 2. Fakta psikologis, apabila berita tersebut disusun dengan bahan baku berupa interpretasi subjektif (pernyataan/opini) terhadap fakta/gagasan.
- b. Kelengkapan Berita adalah muatan berita yang disampaikan dalam formula 5W+1H. Unit ini diuji dengan tiga kategori, yakni *baik*, jika keseluruhan unsur formula tersebut dilaporkan secara penuh. *Sederhana*, jika empat atau lima unsur dari formula tersebut dilaporkan dalam berita. *Buruk*, jika hanya tiga atau kurang dari unsur formula tersebut ada di dalam muatan berita.
- c. Nilai Berita adalah muatan berita yang memberitakan *reshuffle* berdasarkan kriteria-kriteria nilai seperti *kepentingan*, *kejelasan*, *kebaruan*, *keringkasan* dan *skala kejadian*. Unit analisis ini diuji dengan tiga kategori, yakni *tinggi*, jika keseluruhan kriteria nilai tersebut dipenuhi. *Sedang*, jika tiga atau empat kriteria berita tersebut dipenuhi. *Rendah*, jika kurang dari tiga kriteria yang dipenuhi.
- d. Pernyataan narasumber, sebagai indikator untuk melihat apakah pernyataan narasumber yang terdapat dalam pemberitaan berhubungan langsung dengan tema dan fokus pemberitaan atau justru melenceng dan tidak berhubungan dengan tema dan fokus pemberitaan.
 1. Relevan, apabila pernyataan narasumber yang terdapat dalam pemberitaan berhubungan langsung dengan tema dan fokus pemberitaan, yaitu berkaitan, merujuk pada *headline*, teras berita, atau paragraf dan kalimat sebelum atau sesudah pernyataan itu ditempatkan,
 2. Tidak relevan, apabila pernyataan narasumber yang terdapat dalam pemberitaan melenceng dan tidak berhubungan dengan tema dan fokus pemberitaan, yaitu tidak berkaitan atau tidak merujuk baik pada *headline*, teras berita, ataupun paragraf dan kalimat sebelum dan sesudah pernyataan tersebut ditempatkan.
- e. Kaitan adalah berita yang menyampaikan laporan dalam konteks *reshuffle*, yaitu yang terkait secara langsung dengan isu pokok *reshuffle*, terkait tak langsung isu pokok *reshuffle*, terkait langsung dengan *reshuffle* secara umum, ataupun tak terkait langsung dengan *reshuffle*.
- f. Tipe liputan, merupakan strategi peliputan yang dilakukan oleh wartawan dalam meliput suatu peristiwa, terutama peristiwa yang mengandung konflik di dalamnya. Unit ini digunakan untuk

mengetahui apakah jurnalis tersebut mampu meliput semua sisi dalam peristiwa tersebut atau dari hanya satu sisi.

1. Multi sisi, apabila pemberitaan menghadirkan liputan dari berbagai sisi, dan pandangan dari berbagai pihak yang memungkinkan pemberitaan menjadi lebih obyektif.
 2. Dua sisi, apabila pemberitaan menghadirkan liputan dari dua sisi, dari pihak-pihak dengan pandangan yang berbeda mengenai topik pemberitaan.
 3. Satu sisi, apabila pemberitaan hanya menghadirkan liputan dari satu pihak atau pihak-pihak dengan pandangan dan pendapat yang serupa.
- g. Arah berita, yaitu bagaimana media melihat peristiwa yang terjadi dan bagaimana media bersikap terhadap peristiwa tersebut. Dilhat dari pernyataan narasumber yang dikutip oleh jurnalis, dan juga bahasa yang digunakan oleh jurnalis dalam menampilkan peristiwa tersebut.
1. Netral, apabila pemberitaan tersebut tidak mengandung pernyataan, kata dan atau istilah atributif kepada Indonesia yang membangkitkan emosi pembaca (baik emosi positif ataupun emosi negatif).
 2. Positif terhadap *reshuffle*, apabila pemberitaan tersebut mengandung pernyataan, kalimat, kata dan atau istilah atributif terutama yang mengandung dukungan ataupun konstruktif terhadap kebijakan *reshuffle*. Misalnya mengandung

kalimat, kata, atau frase yang memuji, memberikan penilaian positif, yang sebenarnya tidak perlu (apabila dihilangkan, kalimat utama tetap ada artinya dan tidak berubah artinya).

3. Negatif terhadap *reshuffle*, apabila pemberitaan tersebut mengandung pernyataan, kalimat, kata dan atau istilah atributif terutama kritikan dan kecaman tentang terhadap kebijakan *reshuffle*. Misalnya mengandung kalimat, kata, atau frase yang mengkritik, menyindir, dan memberikan penilaian negatif, yang sebenarnya tidak perlu (apabila dihilangkan, kalimat utama tetap ada artinya dan tidak berubah artinya).
- h. Pengetahuan dalam berita adalah informasi yang disediakan oleh aktor/sumber bagi pengetahuan khalayak berkenaan dengan *reshuffle*. Kategori *primer* berkenaan dengan informasi yang berhubungan langsung dengan pokok persoalan *reshuffle*. Kategori *sekunder*, yaitu penjelasan tentang latar belakang ataupun aktivitas berbagai pihak dalam berbagai peristiwa berkenaan dengan *reshuffle*. Kategori *evaluatif*, yaitu penilaian terhadap peristiwa atau kejadian berkenaan dengan *reshuffle*. Kategori *rekomendasi*, yaitu aspirasi (saran atau harapan) terhadap *reshuffle*.

HASIL PENELITIAN

Berita yang menjadi bahan penelitian ini adalah yang berkenaan dengan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Periode yang diamati yaitu September 2011

sampai dengan Oktober 2011. Total berita yang diperoleh sebanyak 63 item, namun hanya 61 item yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, masing-masing 45 berita

dari SKH *Jawa Pos* dan 16 berita dari SKH *Kompas*, seperti ditampilkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Berita *Reshuffle* Kabinet dalam SKH *Jawa Pos*

No	Tanggal Terbit	Judul Berita	No	Tanggal Terbit	Judul Berita
1	17-9- 2011	Sinyal <i>Reshuffle</i> Menguat	24	14-10 2011	Golkar – PPP Berebut Menko Kesra
2	18-9- 2011	Demokrat Minta Tak Paksa SBY	25	14 -10 2011	PKS Punya Pikiran Keluar dari Koalisi Jika Salah Satu Menterinya Dicabut
3	19 -9- 2011	10 Menteri Layak di- <i>Rhesuffle</i>	26	14 -10 2011	Tokoh Aceh Minta Mustafa Tak Diganti
4	20 -9- 2011	Presiden – Wapres Sudah Bahas <i>Rhesuffle</i>	27	15 -10 2011	Tunggu PKS, <i>Reshuffle</i> Tersendat
5	21 -9- 2011	SBY: Tunggu Tanggal Mainnya	28	16 -10 2011	SBY Pilih Enam Wamen baru Lagi
6	21 -9- 2011	Jangan Buat Resah	29	16 -10 2011	PKS Balik Tunggu Presiden
7	22 -9- 2011	PAN – PKB Belum Diajak Bicara	30	17 -10 2011	Aneh, SBY Koleksi 19 Wamen
8	22 -9- 2011	Sudah Ada Parpol Ajukan Nama Menteri	31	17 -10 2011	SBY Lupakan Darwin – Freddy
9	23 -9- 2011	SBY: <i>Reshuffle</i> Kabinet Sebelum 20 Oktober	32	18 -10 2011	Fahri Hamzah Jadi Tumbal <i>Reshuffle</i>
10	24 -9- 2011	Minta Ganti Menteri yang Telat Rapat	33	18 -10 2011	Menteri Dicotpot, dapat jabatan Lain
11	25 -9- 2011	Jatah menteri untuk Parpol Tak Berubah	34	18 -10 2011	SBY Simpan Jatah Golkar – PKS
12	26 -9- 2011	Muhaimin Pasrahkan Nasib ke SBY	35	18 -10 2011	Cerai Menpera Mundur dari Kabinet
13	29 -9- 2011	Banyak Menteri rapor Merah	36	19 -10 2011	Muhaimin-Andi Tak Tersentuh
14	1 -9- 2011	Hanya Dibahas SBY, Budiono, dan Kuntoro	37	19 -10 2011	Fadel: Saya Dizalimi
15	2 -9- 2011	SBY Bakal Rombak gaya Kepemimpinan	38	19 -10 2011	Hari Terakhir: Patrialis Suharso Tak Jalani Tugas
16	3 -9- 2011	SBY Simulasikan Kandidat Menteri	39	19 -10 2011	PKS Ragu Keluar dari Koalisi
17	5 -9- 2011	SBY Tidak Ingin Ada Pihak Kecewa	40	19 -10 2011	Dahlan Disodori 300 Pertanyaan
18	6 -9- 2011	PKS Yakin Menterinya Tak Digeser	41	20 -10 2011	Dahlan Janji Kurangi Intervensi
19	7 -9- 2011	Proses Kocok Ulang meteri di cikeas	42	20 -10 2011	Ical Minta Fadel Konsentrasi di Partai
20	8 -9- 2011	Demokrat Siapkan Menteri Pengganti	43	20 -10 2011	Fadel: Pencopotan bukan Rekomendasi Golkar
21	9 -9- 2011	<i>Reshuffle</i> Tuntas Pekan Ini	44	21 -10 2011	Menteri Dicotpot, Fahri batal Pindah
22	11 -9- 2011	SBY Panggil Menteri PKS	45	22 -10 2011	SDA-Suharso Konsolidasi Internal PPP
23	12 -9- 2011	Ical Minta Tidak Prioritaskan Parpol			

Sumber: data primer

Tabel 3. Berita *Reshuffle* Kabinet dalam SKH *KOMPAS*

No	Tanggal Terbit	Judul Berita
1	19 -9- 2011	Kepuasan Publik Turun
2	19 -9- 2011	Rombak Kabinet atau Negara Hancur
3	20 -9- 2011	Dipo: Menteri Harus Berani
4	21 -9- 2011	jangan Sekedar Ganti
5	30 -9- 2011	Presiden akan Mengubah Gaya Kepemimpinan
6	7 -10 2011	Pembahasan Intensif di Cikeas
7	9 -10 2011	Presiden Ingin Pekan Depam Rampung
8	11 -10 2011	Presiden Minta Jangan Gaduh
9	14 -10 2011	Kabinet Akan Makin Gemuk
10	15 -10 2011	Mendiknas Punya Dua Wakil
11	16 -10 2011	Perombakan Masih Sebatas Wakil Menteri
12	17 -10 2011	Prioritaskan Infrastruktur
13	19 -10 2011	Publik Soroti Beberapa Calon Menteri baru
14	19 -10 2011	Kader Partai Harus Bisa Dikontrol
15	19 -10 2011	Tak Ada Perubahan Pola
16	19 -10 2011	Politisi Masih Mendominasi

Sumber: data primer

Derajat kesamaan dinilai memenuhi syarat kepercayaan karena perhitungan CR menunjukkan hasil sebesar 91%. Berita-berita yang dikoding berjumlah 61 item berita sebagaimana tertera pada tabel 2 dan tabel 3.

Berita *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II Ditinjau dari Sisi Obyektivitas dalam *Jawa Pos* dan *Kompas* Periode September-Oktober 2011

Kecenderungan pemberitaan SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* tentang isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II periode September 2011-Oktober 2011 dikaji dalam 9 kategori, yaitu: (1) sifat fakta, (2) kelengkapan unsur-unsur berita, (3) nilai berita, (4) pernyataan narasumber, (5) kaitan pernyataan narasumber dengan isu *reshuffle*, (6) konteks, (7) pengetahuan

dalam berita, (8) tipe liputan dan (9) arah penyampaian berita. Berikut penjabaran hasil analisis yang sudah dilakukan:

a. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Sifat Fakta

Unit analisis sifat fakta dalam penelitian ini merujuk pada prinsip *truth* dalam obyektivitas, yang menuntut perbedaan antara fakta dan opini dalam pemberitaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur sifat fakta dengan dua kategori, yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis. Dari 45 item berita di SKH *Jawa Pos*, 38 berita di antaranya (84,4%) menggunakan fakta psikologis dan sisanya, yaitu 7 berita (15,6%) menggunakan fakta sosiologis. Sedangkan di SKH *Kompas* dari total 16

item berita, 13 di antaranya atau 81,2% menggunakan fakta psikologis dan sisanya, yaitu 3 berita atau 18,8% menggunakan fakta sosiologis.

Contoh berita yang menggunakan fakta sosiologis di SKH *Jawa Pos* antara lain seperti berikut: "*Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad akhirnya menemukan jawaban mengapa dirinya dicopot dari jabatan menteri kelautan dan perikanan*" (*Jawa Pos*, 20 Oktober 2011). Sedangkan berita yang menggunakan fakta psikologis adalah sebagai berikut: "*Fadel mengaku masih menyimpan rasa kecewa atas pencopotan dirinya. Dalam hal ini cara Presiden SBY tersebut membuat dirinya merasa terzalimi*" (*Jawa Pos*, 20 Oktober 2011)

Contoh berita yang menggunakan fakta sosiologis di SKH *Kompas* antara lain seperti berikut: "*Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono akan mengadakan pembahasan tentang perombakan kabinet secara intensif sebelum bertemu dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah*" (*Kompas*, 7 Oktober 2011). Sedangkan berita yang menggunakan fakta psikologis adalah sebagai berikut: "*Sebagai pengusaha saya tidak ingin ikut-ikutan melihat asal-muasal menteri dari partai politik tertentu. Sudah tidak zamannya lagi....kata Sofjan*" (*Kompas*, 17 Oktober 2011).

Berita yang baik hanya dapat ditulis apabila didukung oleh fakta yang lengkap dan akurat (Siregar, 1998:43). Jenis fakta yang menjadi fokus penelitian ini adalah fakta sosiologis dan fakta psikologis.

Apabila diamati pada tabel di atas maka terlihat bahwa fakta psikologis merupakan jenis fakta yang mendominasi pemberitaan di kedua surat kabar. Baik SKH *Jawa Pos* maupun SKH *Kompas* sama-sama memberikan porsi untuk fakta psikologis lebih besar daripada porsi yang diberikan kepada fakta sosiologis.

Dalam pemberitaan isu seputar *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II, media lebih banyak mengambil bahan baku dari pendapat anggota partai dan pemerintah. Iwan Awalludin Yusuf (dalam Rahayu, 2006:154) melalui penelitiannya mengenai keberpihakan media dalam kasus Buyat menyatakan bahwa wartawan Indonesia lebih banyak terjebak mengutip pernyataan para tokoh elit daripada melakukan observasi langsung di lapangan. Pernyataannya cukup terbukti seperti didapat dari data, SKH *Jawa Pos* 84,4% dan SKH *Kompas* 81,2%. Dalam pemberitaan isu seputar *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II ini pernyataan dari pihak pemerintah lebih banyak mendominasi pemberitaan.

b. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Kelengkapan Unsur-Unsur Berita

Aspek *completeness* digunakan untuk mengukur kesempurnaan laporan dengan mengasumsikan bahwa sejumlah minimum informasi yang relevan diperlukan untuk mendapatkan pemahaman berita (Rahayu, 2006:49). Dalam penelitian ini,

kelengkapan unsur 5W+1H merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk melihat tingkat kelengkapan informasi dalam pemberitaan mengenai *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas*.

Unit analisis kelengkapan unsur-unsur berita, yaitu unsur *what, who, why, when, when, where, dan how*, dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur dimensi *completeness* dalam obyektivitas sebuah berita. Sebuah berita dapat lebih dipercaya dan diandalkan dengan adanya keenam unsur tersebut di dalamnya. Untuk itu, unsur 5W+1H dalam sebuah berita haruslah terpenuhi.

Tabel 4a. memperlihatkan hasil pengkodean bahwa kelengkapan unsur 5W+1H dalam berita-berita SKH *Jawa Pos* cukup tinggi. Lima unsur sudah terpenuhi dengan baik dalam 42 item berita *Jawa Pos* mengenai isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Sementara 3 berita lainnya atau 6,7% secara sederhana telah memenuhi kelengkapan unsur-unsur berita tersebut, yang artinya tidak semua unsur 5W+1H terdapat di dalamnya melainkan hanya 3-4 unsur. Sementara itu kelengkapan unsur 5W+1H dalam berita-berita SKH *Kompas* cukup tinggi. Lima unsur sudah terpenuhi dengan baik dalam 16 item berita SKH *Kompas* mengenai isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Semua item berita *Kompas* memenuhi kelengkapan unsur-unsur berita yang diperlukan agar berita dikatakan obyektif.

c. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Nilai Berita

Nilai berita merupakan tolok ukur untuk melihat dimensi *relevance* dalam obyektivitas pemberitaan dalam penelitian ini. Dalam unit analisis ini terdapat tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Nilai berita dikatakan tinggi apabila berita tersebut mengandung lima atau lebih nilai berita. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi dalam berita tersebut penting untuk diketahui khalayak.

Untuk mengukur nilai berita dalam pemberitaan mengenai isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II, digunakan indikator tinggi, sedang dan rendah dengan berdasarkan kriteria-kriteria kepentingan, kejelasan, kebaruan, keringkasan, drama, dan skala kejadian. Berita yang dinilai mengandung nilai berita tinggi apabila di dalamnya terdapat lima sampai keseluruhan kriteria tersebut. Menengah, apabila tiga atau empat kriteria berita tersebut terpenuhi, dan rendah apabila kurang dari tiga kriteria yang terpenuhi.

Tabel 4b menunjukkan hasil pengkodean yang dilakukan terhadap 45 item berita mengenai isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* ditemukan bahwa 42 berita atau 93,3% mengandung nilai berita tinggi, 3 berita atau 6,7% mengandung nilai berita sedang, dan tidak ada berita yang nilai beritanya rendah. Sedangkan dari hasil pengkodean yang dilakukan terhadap 16 item berita mengenai isu *reshuffle* Kabinet Indonesia

Bersatu II dalam SKH *Kompas*, diperoleh keseluruhannya (100,0%) mengandung nilai berita tinggi.

Berdasar tabel tersebut dapat dilihat bahwa seberapa besar pemberitaan mengenai *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam *Jawa Pos* dan *Kompas* mengandung nilai berita yang tinggi, yang artinya berita-berita tersebut dimuat karena mengandung informasi yang layak dan penting untuk diketahui masyarakat.

d. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Pernyataan Narasumber

Unit analisis pernyataan narasumber digunakan untuk mengukur dimensi *relevance* dalam obyektivitas berita. Diharapkan media mampu bersikap obyektif dalam memilih dan menentukan pernyataan-pernyataan narasumber yang baik dan layak dicantumkan dan melengkapi informasi yang akan dihadirkan kepada masyarakat, dalam arti bahwa pernyataan tersebut tidak melenceng dari topik yang dihadirkan, serta benar merupakan informasi penting, bukan sekedar bumbu pemberitaan.

Berdasarkan hasil pengkodean pada tabel 4c ditemukan bahwa keseluruhan pemberitaan tentang isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II baik di SKH *Jawa Pos* maupun di SKH *Kompas* mengandung pernyataan-pernyataan narasumber yang relevan dengan tema dan isi berita. Pemberitaan di kedua surat kabar dapat

dikatakan seluruhnya mengandung pernyataan-pernyataan narasumber yang relevan dengan topik berita, yaitu berkaitan, merujuk pada *headline*, teras berita, atau paragraf dan kalimat sebelum atau sesudah pernyataan itu ditempatkan.

e. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Kaitan Pernyataan Narasumber dengan Isu *Reshuffle*

Unit analisis kaitan pernyataan narasumber dengan isu *reshuffle* juga digunakan untuk mengukur *relevance* dalam obyektivitas berita. Berita dikatakan obyektif apabila mampu memilih dan memilah pernyataan-pernyataan narasumber yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

Dari hasil pengkodean pada tabel 4d diperoleh bahwa 7 item atau 15,5% berita SKH *Jawa Pos* tentang isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II mengandung pernyataan-pernyataan narasumber yang berhubungan langsung dengan *reshuffle* secara khusus. Sejumlah 21 item berita atau 46,7% mengandung pernyataan narasumber yang tak langsung dengan *reshuffle* kabinet secara khusus. Pernyataan narasumber yang langsung terkait dengan *reshuffle* kabinet secara umum adalah sebanyak 13 item berita atau 28,9%. Sementara 4 item berita sisanya atau 8,9% mengandung pernyataan narasumber yang tak langsung dengan *reshuffle* kabinet secara umum.

Di pihak lain, sebanyak 6 item atau 35,5% berita di SKH *Kompas* tentang

isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II mengandung pernyataan-pernyataan narasumber yang berhubungan langsung dengan *reshuffle* secara khusus. Sejumlah 2 item berita atau 12,5% mengandung pernyataan narasumber yang tak langsung dengan *reshuffle* kabinet secara khusus. Sedangkan pernyataan narasumber yang langsung terkait dengan *reshuffle* kabinet secara umum sebanyak 1 item berita atau 6,3% dan 7 item berita sisanya atau 43,7% mengandung pernyataan narasumber yang tak langsung dengan *reshuffle* kabinet secara umum.

f. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Konteks Berita

Unit analisis ini adalah untuk melihat dari peristiwa apa kira-kira suatu berita itu disusun. Nyaris seluruh berita baik di SKH *Jawa Pos* maupun SKH *Kompas* bersumber dari hasil wawancara, masing-masing 88,9% dan 93,7%. SKH *Jawa Pos* relatif menggunakan sumber lain juga untuk beritanya (11,1%) seperti misalnya sumber dari konferensi pers. Sedangkan berita dari sumber semacam itu di SKH *Kompas* hanya 1 buah (6,3%).

Reshuffle yang menjadi topik pemberitaan umumnya merupakan wacana yang dibentuk melalui apa yang “dipikirkan” oleh narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jurnalis. Artinya, nyaris segala hal mengenai persoalan *reshuffle* dimengerti melalui apa yang dipahami dan diharapkan

oleh jurnalis melalui penjelasan para narasumber tersebut. Pengkayaan wacana yang diandaikan melalui berita-berita yang disampaikan tersebut boleh jadi memang dapat tercapai, namun asumsi bahwa berita di media adalah suatu konstruksi menjadi terbukti. Di sisi lain, di dalam hal itu tersimpan potensi distorsi karena tak dapat dipungkiri bahwa pertanyaan dari jurnalis dan jawaban narasumber bisa sarat dengan kepentingan. Tabel 4d dan 4e dapat menjadi gambaran terjadinya kecenderungan tersebut.

g. Perbandingan Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam *Jawa Pos* dan *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Pengetahuan Narasumber dalam Berita

Unit analisis ini untuk mengkaji perihal apa sebenarnya yang termuat dalam pemberitaan tentang *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari Tabel 4f dapat dilihat bahwa berita sekunder mendominasi pemberitaan di SKH *Jawa Pos* sedangkan di SKH *Kompas* hampir merata untuk evaluatif-rekomendasi-primer. Satu yang sama dari kedua surat kabar ini yaitu bahwa pengetahuan primer narasumber tentang *reshuffle* bukanlah yang paling utama.

Dari hasil pengkodean pada tabel 4f ditemukan sebanyak 21 item berita SKH *Jawa Pos* atau 46,7% memuat pengetahuan sekunder narasumber. Ini dapat ditafsirkan bahwa informasi narasumber yang disediakan oleh SKH *Jawa Pos* adalah penjelasan tentang latar belakang ataupun aktivitas pelbagai pihak di dalam pelbagai

peristiwa berkenaan dengan berlangsungnya *reshuffle*. Sebanyak 11 item berita atau 24,4% memuat pengetahuan primer narasumber, sejumlah 5 item berita atau 11,1% adalah pengetahuan evaluatif, dan sisanya yaitu 8 item berita atau 17,8% memuat pengetahuan rekomendasi. Sementara itu, sebanyak 3 item berita di SKH *Kompas* atau 18,7% memuat pengetahuan sekunder narasumber. Sejumlah 4 item berita atau 25,0% memuat pengetahuan primer narasumber, sebanyak 5 item berita atau 31,3% adalah pengetahuan evaluatif, dan sisanya sebanyak 4 item berita (25,0%) memuat pengetahuan rekomendasi.

Kedua surat kabar tersebut memperlihatkan pengetahuan primer narasumber tentang *reshuffle* bukanlah sebagai materi utama dalam muatan berita *reshuffle*. Meskipun demikian, kedua surat kabar ini cenderung menempatkan pengetahuan primer narasumber ada di posisi kedua, masing-masing 24,4% di SKH *Jawa Pos* dan 25,0% di SKH *Kompas*.

h. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Tipe Liputan

Unit analisis ini melihat bagaimana cara liputan dari suatu peristiwa dilakukan. Tabel 4g memperlihatkan bahwa kedua surat kabar memilih cara peliputan yang berbeda dalam memberitakan *reshuffle*. SKH *Jawa Pos* memberitakan *reshuffle* dengan cenderung mengutamakan peliputan satu sisi (55,6%), diikuti dengan peliputan dua sisi (33,3%) dan peliputan multi

sisi (11,1%). Sebaliknya SKH *Kompas* menyediakan liputan multi sisi sebanyak 37,5% yang relatif lebih besar dari liputan dua sisi dan satu sisinya (masing-masing 31,25%).

i. Berita Seputar Isu *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* Dilihat dari Unit Analisis Arah Penyampaian Berita

Arah penyampaian berita digunakan untuk melihat bagaimana media menerapkan prinsip *neutral presentation* dalam obyektivitas pemberitaan. Dalam penelitian ini, arah berita digunakan untuk melihat bagaimana sikap media terhadap isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II: adakah media bersikap netral, yaitu apabila pemberitaan tersebut tidak mengandung pernyataan, kata dan atau istilah atributif yang membangkitkan emosi pembaca (baik itu emosi positif ataupun emosi negatif), ataukah media memberikan gambaran positif, yaitu apabila pemberitaan tersebut mengandung pernyataan, kalimat, kata dan atau istilah atributif terutama yang mengandung pujian, yang dapat membangkitkan emosi positif pembacanya, ataukah media justru memberikan gambaran negatif, yaitu apabila pemberitaan tersebut mengandung pernyataan, kalimat, kata dan atau istilah atributif terutama kritikan yang dapat membangkitkan emosi negatif pembacanya.

Hasil pengkodean pada tabel 4h memperlihatkan bahwa sebanyak 19 item berita SKH *Jawa Pos* atau 42,2%

memberikan dukungan positif terhadap *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebanyak 17 item berita atau 37,8% memberikan gambaran negatif dan sisanya sebanyak 9 item berita atau 20,0% memberikan gambaran yang netral tentang isu *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebaliknya, sebanyak 10 item berita atau

62,6% berita di SKH *Kompas* memberikan gambaran negatif perihal *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Lalu masing-masing sebanyak 3 item berita, atau 6,7%, memberikan gambaran netral dan positif. Contoh berita yang menunjukkan arah berita dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Analisis Berita Berdasar Unit Analisis

Unit Analisis		Kategori	SKH Jawa Pos		SKH Kompas	
			N	%	N	%
a. Kelengkapan Unsur-Unsur Berita	Baik		42	93,3	16	100,0
	Sederhana		3	6,7	0	0
	Buruk		0	0	0	0
	Tidak Ada		0	0	0	0
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
b. Nilai Berita	Tinggi		42	93,3	16	100,0
	Sedang		3	6,7	0	0
	Rendah		0	0	0	0
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
c. Pernyataan Narasumber	Relevan		45	100,0	16	100,0
	Tidak Relevan		0	0	0	0
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
d. Kaitan Pernyataan Narasumber dengan Isu <i>Reshuffle</i>	Langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara khusus		7	15,5	6	37,5
	Tak langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara khusus		21	46,7	2	12,5
	Langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara umum		13	28,9	1	6,3
	Tak Langsung dengan <i>reshuffle</i> kabinet secara umum		4	8,9	7	43,7
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
e. Konteks Berita	Wawancara		40	88,9	15	93,7
	Pertemuan Resmi		5	11,1	1	6,3
	Kejadian Aktual		0	0	0	0
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
f. Pengetahuan Narasumber dalam Berita	Primer		11	24,4	4	25,0
	Sekunder		21	46,7	3	18,7
	Evaluatif		5	11,1	5	31,3
	Rekomendasi		8	17,8	4	25,0
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
g. Tipe Liputan	Multi Sisi		5	11,1	6	37,5
	Dua Sisi		15	33,3	5	31,25
	Satu Sisi		25	55,6	5	31,25
		Jumlah	45	100,0	16	100,0
h. Arah Berita	Netral		9	20,0	3	6,7
	Positif		19	42,2	3	6,7
	Negatif		17	37,8	10	62,6
		Jumlah	45	100,0	16	100,0

Sumber: data primer

Tabel 5. Contoh Berita

Arah Berita		SKH Jawa Pos	SKH Kompas
Negatif	Tanggal	17 Oktober 2011	29 September 2011
	Judul	"Aneh, SBY Koleksi 19 Wamen":	"Rombak Kabinet atau Negara Hancur":
	Contoh	"Menurut dia, bisa juga presiden berkonsentrasi pada penggantian menteri yang sikapnya tak simpatik. Termasuk, mengganti menteri yang latar belakang pendidikannya tak relevan dengan posisi yang diemban. 'Eh, ini kok jabatan wakil menteri yang mau ditambah, lucu dan ironis sekali' sesal Laode Ida"	"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya segera mengganti para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu II apabila ingin diingat telah berupaya menghindarkan Indonesia dari kehancuran"
Positif	Tanggal	2 Oktober 2011	30 September 2011
	Judul	"SBY Bakal Rombak Gaya Kepemimpinan":	"Presiden Akan Mengubah Gaya Kepemimpinan":
	Contoh	"...reshuffle bakal sangat berdampak terhadap gaya kepemimpinan SBY. Nanti presiden lebih menerapkan pola pendekatan intervensionis. Hal itu dilakukan agar pemerintah lebih mudah menyelesaikan masalah"	"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen mengakselerasi kinerja pemerintahan dalam sisa tiga tahun kepemimpinannya"

Sumber: data primer

PEMBAHASAN

Dalam suatu pendapat mengenai berita di televisi, Golding dan Elliott (Darmawan, 2007:265) pernah mengungkapkan absennya proses sosial dan kuasa dalam masyarakat. Menurut mereka, format kejadian tunggal yang menjadi cara berita televisi dibuat itu senantiasa berkenaan dengan peristiwa saat ini, hari ini, sehingga apa yang ditayangkan selalu terlepas dari sejarahnya. Hal ini membuat pemirsa mengalami kesulitan untuk memahami hakikat masalah dari yang diberitakan. Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa karena berita di televisi itu selalu berwujud tindakan perorangan maka yang terlihat hanyalah presentasi dari tokoh-tokoh yang diposisikan menjadi narasumber. Ini membuat pemirsa sulit melihat siapa sebenarnya yang berperan dalam mengatur suatu perubahan karena tersamarkan oleh kehadiran tokoh tersebut.

Apakah itu hanya berlaku di media televisi? Audiens boleh khawatir bahwa hal itu terjadi juga pada pemberitaan di media cetak. Secara praktis, peristiwa yang diberitakan selalu bersifat kekinian, aktual, *up to date*. Setiap hari audiens selalu menemukan kebaruan dalam topik-topik berita, yang berbeda dari sebelumnya. Nyaris sulit ditemukan adanya suatu berita di media cetak yang berupa serial berkelanjutan secara kronologis yang membeberkan detail proses dari suatu peristiwa hingga tuntas. Kalaupun ada, itu biasanya berupa kompilasi. Selain itu audiens juga cenderung selalu "dipertemukan" dengan tokoh-tokoh yang menjadi sumber berita, orang perorangan yang ditempatkan sebagai penyampai pernyataan, sehingga audiens tetap sulit menemukan aktor sebenarnya yang punya pengaruh utama. Tentu saja televisi memiliki keunggulan visual yang sangat memungkinkannya untuk secara efektif dan

mudah mengundang kesan atas peristiwa yang sedang diberitakan, sementara tulisan di surat kabar baru mengundang impresi setelah proses rekonstruksi imaji di alam pikir pembaca terbentuk.

Proses pembelajaran tentang *reshuffle* kabinet bagi masyarakat luas melalui pemberitaan di media massa di negeri ini juga terbentuk dalam kerangka seperti itu yaitu absennya proses sosial dan kuasa dalam masyarakat. Melalui studi sederhana atas pemberitaan *reshuffle* yang ditemukan dari SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas*, dapat dilihat adanya kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan bahwasanya persoalan kinerja pemerintahan itu disederhanakan sedemikian rupa sebagai persoalan politik semata, bukan berkenaan dengan profesionalitas, tanggung jawab dan kedewasaan tentang cara pengelolaan pemerintahan/negara yang berorientasi pada pelayanan publik. Kesan ini demikian kuat karena pada umumnya berita-berita tentang *reshuffle* yang diamati justru tidak bicara khusus tentang *reshuffle* itu sendiri, melainkan tentang hal lain, yang terkesan kuat lebih merepresentasikan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak lain yang modusnya cukup linier dengan pola transaksi politik sebagaimana yang ditampilkan melalui koalisi partai pendukung pemerintahan SBY. Dari temuan data hal itu cukup mudah dilihat, SKH *Jawa Pos*, misalnya, jauh lebih mengutamakan pengetahuan sekunder sebagai bahan pemberitaannya, sedangkan SKH *Kompas* menonjolkan pengetahuan evaluatif.

Bangunan pemahaman semacam itu juga terkesan begitu rapuh untuk menjadi pengetahuan publik. Data menunjukkan bahwa realitas *reshuffle* dan problematika yang disodorkan pada dasarnya merupakan realitas yang disusun dari persepsi, asumsi dan perspektif jurnalis, yang dikuatkan melalui pernyataan-pernyataan para narasumber. Melalui desain pertanyaan yang “menggoda” narasumber untuk mengungkapkan apa yang menjadi pendapat, penilaian dan harapannya maka semua respon dari narasumber tersebut lantas terkesan merupakan penjabaran dari inti persoalan kabinet yang sedang mewujud dan *reshuffle* yang seharusnya. Ilusi semacam ini terkemas dengan sangat rapi dan alami berhubung berita tersebut dikerjakan oleh jurnalis profesional yang prinsip kerja pembuatan beritanya sangat tunduk terhadap aturan profesionalnya, yakni senantiasa memperhitungkan aspek-aspek 5W+1H dan nilai berita. Kondisi-kondisi semacam ini mudah memunculkan dugaan besarnya potensi distorsi ataupun deviasi yang dikemas sebagai muatan suatu pemberitaan.

Terancamnya publik dari keleluasaan untuk memperoleh informasi yang benar-benar kontributif dan konstruktif untuk menjadi pengetahuan sesuai dengan kenyataannya seperti mendapat penegasan lebih lanjut dari adanya data yang menunjukkan bahwa pemberitaan tentang *reshuffle* ini memang tidak mengutamakan netralitas. Dari persentasenya yang terhitung paling kecil, netralitas terkesan menjadi hal paling akhir dalam pemberitaan tentang

reshuffle kabinet tersebut. SKH *Jawa Pos* tampak lebih menonjolkan dukungannya kepada pemerintah c.q. presiden dalam kebijakan *reshuffle* ini, walaupun juga hampir agak berimbang mencoba untuk mempersoalkan keputusan tersebut. Berbeda halnya dengan SKH *Kompas* yang justru didominasi oleh pemberitaan dengan muatan yang lebih menonjolkan kecaman dan kritik terhadap kebijakan *reshuffle* tersebut. Kecenderungan di kedua surat kabar ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan peliputan dan pembuatan berita, para jurnalis tersebut lebih memainkan peran mereka sebagai wakil dari publik yang punya andil, baik dalam mengkritisi maupun mendukung kebijakan *reshuffle* tersebut, sembari sekaligus menegaskan fungsi media sebagai pilar ke empat demokrasi.

Tendensi pemberitaan yang tak netral ini tampak tak terlalu mengherankan ketika di SKH *Jawa Pos*, misalnya, sebagian besar berita dihasilkan dari bahan-bahan yang dikumpulkan hanya dengan menonjolkan peliputan satu sisi. Hal itu menimbulkan kesan seolah-olah berita dihasilkan dalam suatu kecepatan tertentu untuk mengejar kuota atau tenggat, sehingga pembuatannya pun harus diselesaikan dengan mengurangkan setiap kemungkinan yang dapat menghambat. Melakukan liputan satu sisi menjadi solusi karena ringkas dan praktis dengan target dan bahan mudah terpenuhi. Dalam hal ini, berita di SKH *Jawa Pos* yang cenderung mendukung kebijakan *reshuffle* mengesankan bahwa muatannya sangat tendensius dan prematur.

Ini agak berbeda dengan yang ada di SKH *Kompas* di mana kecenderungan kritik atas kebijakan *reshuffle* seperti memiliki pondasi yang lebih kokoh karena dihasilkan dari liputan yang cenderung mengutamakan multi sisi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecenderungan yang dapat ditafsirkan dari hasil temuan dan analisis terkait pemberitaan tentang *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* antara lain: 1) *reshuffle* lebih merupakan artikulasi endapan narasumber berita yang dapat berupa pendapat dan pemikiran pribadi ataupun harapan dan keinginan parsial, 2) media lebih memilih ruang wacana *reshuffle* untuk diisi dan dikuasai oleh pihak yang tidak secara langsung punya otoritas melakukan *reshuffle*, 3) pewacanaan tentang *reshuffle* lebih banyak tentang hal-hal yang tidak terkait langsung dengan *reshuffle* itu sendiri, 4) media mengandaikan bahwa wawancara tokoh merupakan cara paling tepat untuk menghadirkan keterwakilan, kemenyeluruhan dan keakuratan pengetahuan dalam pembicaraan tentang *reshuffle*, 5) mengisi muatan pemberitaan yang riuh dengan dukungan atau kritik tampak menjadi formula yang disukai untuk mencerminkan kontribusi demokratisnya media massa di Indonesia, meski euforianya dapat menyulitkan media itu sendiri, misalnya, menjadi tak menganggap penting lagi prinsip-prinsip peliputan multi sisi.

Kesan bahwa secara umum pemberitaan tentang *reshuffle* kurang

obyektif menjadi mudah dirasakan jika menyimak data yang ditemukan dalam penelitian ini melalui kedua surat kabar tersebut. Kesan ini menguat ketika kita, misalnya, mencoba mencari kejelasan tentang hakikat *reshuffle* dalam konteks penyelenggaraan negara demi memenuhi kedaulatan dan kepentingan rakyat. Barangkali karena persoalan *reshuffle* cenderung merupakan “misteri” karena merupakan hak prerogatif presiden yang membuat kita hanya menemukan *reshuffle* “versi” media. Namun barangkali justru karena soal hak prerogatif itu pula yang mendorong media menempuh caranya dalam membangun proses pembelajaran bagi publik untuk memiliki pengetahuan dalam rangka memahami soal itu (*reshuffle*), meski sifatnya ada di pinggiran, cenderung menduga-duga atau bahkan membangun kenyataannya sendiri.

Secara teknis, berita-berita tentang *reshuffle* memang cenderung tanpa persoalan. Prinsip-prinsip teknis jurnalistik tampak diterapkan dengan baik, tetapi persoalan berita juga terletak pada muatan dan peminatannya. Berita yang tak cukup obyektif tentu tidak bisa segera dihakimi sebagai produk jurnalis dan media yang begitu buruk. Tentu cukup dilematis jika harian sekaliber SKH *Jawa Pos* dan SKH *Kompas* menempuh cara yang merusak kredibilitasnya sendiri. Namun pemberitaan yang tak cukup obyektif itu dapat diduga lebih merupakan implikasi dari tuntutan produksi media, di satu sisi, dan keterbatasan bahan baku berita yang tersedia, di mana keduanya tidak memiliki

kecepatan kerja yang sama. Ketika sumber utama materi berita yang dapat memperjelas permasalahan tidak kunjung tersedia, ada kesan media mengejar sumber lain supaya proses produksinya tak terhenti. Kepraktisan yang mendukung produktivitas semacam inilah yang menjadi salah satu kondisi terciptanya kecenderungan muatan berita yang tak cukup obyektif tersebut. Inilah tantangan yang tetap serius bagi media, karena kecenderungan cara kerja dan produk yang semacam itu hanya menegaskan ulang kepentingan komodifikasinya dan mengabaikan aspek etis terkait agenda *setting* kepada publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan perspektif dan metodologis yang menghalangi pengembangan tafsir atas data-data yang ditemukan. Oleh karena itu pendalaman studi dengan menggunakan metode dan perspektif lain dan relevan tentu akan sangat memungkinkan ditemukannya tafsiran-tafsiran yang lebih luas sehingga dapat memberikan penjelasan dan kejelasan yang lebih komprehensif tentang *reshuffle* dan pemberitaan *reshuffle* di media. Pendekatan ekonomi politik ataupun kajian budaya dalam riset-riset lebih lanjut, misalnya, dapat memungkinkan diungkapkannya sisi-sisi lain yang dapat lebih memperjelas persoalan ini. Studi yang melibatkan format media dan juga metode penelitian lain, seperti berita di televisi ataupun media *online* dan metode analisis wacana ataupun semiotika, tentu akan dapat semakin memperkaya temuan dan analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Josep J. 2007. Mengkaji ulang keniscayaan terhadap berita (televisi)”, dalam Pabilon H. Manurung (ed), *Komunikasi dan kekuasaan*. Yogyakarta: FSK FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fiske, John. 1990. *Introduction to communication studies*. Second Edition. New York & London: Routledge.
- Frey, Lawrence R., Carl H. Botan, Paul G. Friedman, Gary L. Kreps. 1991. *Investigating communication: An introduction to research methods*. New Jersey: Prentice Hall.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis isi: Pengantar teori dan metodologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Manning, Paul. 2001. *News and news sources: A critical introduction*. London: Sage Publication.
- McQuail, Denis. 1992. *Media performance: Mass communication and the public pnterest*. London: Sage Publication.
- McQuail, D. 1994. *Mass communication theory: An introduction*, Third edition. London: Sage Publications.
- Rahayu (ed). 2006. *Menyingkap profesionalisme kinerja suratkabar di Indonesia*. ----- : Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana meliput dan menulis berita untuk media massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyudi, J. B. 1996. *Dasar-dasar jurnalistik radio dan televisi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wimmer, Roger D. & Joseph R. Dominick. 2003. *Mass media research: An introduction*. Seventh Edition. USA: Wadsworth.

